



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG LITERASI  
KOMISI X DPR RI KE KABUPATEN TEGAL  
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023—2024  
TANGGAL 22—24 SEPTEMBER 2023**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Kunjungan Kerja**

Komisi X DPR RI sebagai mitra Perpustakaan Nasional RI, sebagaimana Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 22 Agustus 2023 akan melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Literasi ke Kabupaten Serang Banten, Kabupaten Garut Jawa Barat, dan Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
8. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 98 ayat (4) huruf f.
9. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
10. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 22 Agustus 2023.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Literasi Komisi X DPRI RI ini adalah dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program literasi dan strategi pemenuhan tenaga perpustakaan serta kepastian statusnya di daerah. Adapun tujuan kunjungan kerja ini untuk mendapatkan data empiris mengenai permasalahan-permasalahan terkait literasi serta pemenuhan kebutuhan tenaga perpustakaan.

### **C. Agenda Kunjungan Kerja**

1. Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Literasi Komisi X DPR RI dengan Bupati Tegal beserta jajaran terkait Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, dihadiri oleh:
  - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal.
  - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
  - Perwakilan perpustakaan kampus di Kabupaten Tegal.

- Perwajilan kepala sekolah/tenaga kependidikan/pustakawan dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA di Kabupaten Tegal.
  - Perwakilan pengurus/pengelola perpustakaan komunitas, perpustakaan masyarakat, perpustakaan desa dan yang sejenis, pegiat literasi.
  - Perwakilan organisasi profesi perpustakaan di Kabupaten Tegal
2. Peninjauan lapangan ke perpustakaan daerah Kabupaten Tegal.

#### D. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Spesifik Bidang Literasi Komisi X DPR RI ke Kabupaten Tegal Jawa Tengah pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat Komisi X DPR RI, Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Bagian TVR Parlemen, dan Bagian Media Cetak dan Media Sosial Sekretariat Jenderal DPR RI. Kunjungan kerja didampingi oleh Drs. Nurcahyono, S.S., M.Si. (Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpustakaan Nasional RI), dan Drs. Muh. Abdul Khak, M.Hum (Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek RI). Tim juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan DPR RI yaitu:

## II. ISI LAPORAN

### A. Identifikasi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Literasi Kabupaten Tegal

1. Berdasarkan Rapor Pendidikan Kabupaten Tegal tahun 2023 capaian literasi Kabupaten Tegal sebagai berikut, pada jenjang SMA skor 78,08 (baik), jenjang SMP skor 71,01 (baik) dan jenjang SD skor 66,05 (sedang).
2. Per tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal melakukan pembinaan perpustakaan tingkat satuan pendidikan dasar sebanyak 108 perpustakaan. Capaian persentasi perpustakaan yang telah memiliki gedung perpustakaan sebesar 27,3%. Namun yang memiliki tenaga perpustakaan hanya sebanyak 40 perpustakaan, sehingga capaian hanya sebesar 10%.
3. Nilai indek pembangunan literasi masyarakat (IPLM) di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 terhitung rendah yaitu sebesar 53,911153.
4. Jumlah perpustakaan di wilayah Kabupaten Tegal, sebagai berikut.

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1.	Perpustakaan umum	1
2.	Perpustakaan khusus	25
3.	Perpustakaan desa/kelurahan	63
4.	Sekolah (SD/MI, SMP/Mts, SMA, SMK, MA)	559
5.	Masjid	20
6.	Lapas	1
7.	TBM	42
	<b>Jumlah</b>	<b>711</b>

5. Jumlah Tenaga Perpustakaan di wilayah Kabupaten Tegal, yaitu:

No.	Jenis Instansi	Jumlah
1.	Perpustakaan daerah	20
2.	Perpustakaan OPD	88
3.	Perpustakaan SD	51
4.	Perpustakaan SMP	94
5.	Perpustakaan SMA/SMK	67
6.	Perpustakaan perguruan tinggi	1
7.	Perpustakaan kecamatan	5
	<b>Jumlah</b>	<b>326</b>

6. Strategi Pemerintah Kabupaten Tegal guna pemenuhan tenaga literasi yaitu dengan pemberdayaan guru yang ada di sekolah. Namun, kendalanya kompetensi guru tidak sesuai dan pembagian waktu tidak maksimal. Adapun pendanaan untuk pemenuhan tersebut diambil dari dana BOS sesuai peraturan yang berlaku.
7. Terdapat beberapa usulan dari pemangku literasi Kabupaten Tegal guna pemajuan layanan literasi di Kabupaten Tegal, di antaranya; (1) meminta dukungan anggaran penyediaan dan perawatan hosting dan domain yang berkapasitas besar guna menghadirkan perpustakaan digital serta termasuk layanan akses publik dalam pemanfaatan perpustakaan digital; (2) pengadaan tenaga teknis sebagai pengelola/admin, serta pelatihan tenaga teknis untuk pengelolaan perpustakaan digital; (3) pendampingan dalam upaya penerbitan Perbup terkait budaya literasi digital; (4) pengadaan/rehabilitasi gedung perpustakaan; (5) adanya penambahan bantuan hibah buku kepada perpustakaan di sekolah-sekolah dan taman baca di lingkungan Kabupaten Tegal; dan (6) adanya penambahan pagu anggaran kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal lewat dana APBN/APBD.
8. Terdapat beberapa program penguatan literasi digital yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu, pembangunan smart city, pelatihan digital, penyediaan hotspot area ada di alun-alun, trasa dan pembangunan gedung pemerintahan berbasis digital. Adapun guna meningkatkan daya baca dan tulis, Pemerintah Daerah Kota Tegal mewajibkan setiap OPD mempunyai ruang perpustakaan manual dan digital, mengadakan perpustakaan keliling dan setiap sekolah didukung untuk memiliki gedung perpustakaan.

#### **B. Masukan dan Aspirasi Pemangku Literasi Daerah di Kabupaten Tegal serta Respon Komisi X DPR RI dan Pemerintah**

1. Bupati Tegal, Hj. Umi Azizah dalam kesempatan sambutannya menyampaikan informasi dan aspirasinya di antaranya, sebagai berikut:
  - a. posisi perpustakaan sebagai sumber lahirnya peradaban mulai bergeser karena kemajuan ilmu teknologi, terutama teknologi informasi digital, dan pergeseran kebiasaan serta gaya hidup di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari fenomena penutupan sejumlah toko buku

- b. berdasarkan data, terjadi penurunan tingkat kunjungan ke perpustakaan dari waktu ke waktu harus menjadi cambuk untuk mengembalikan marwah perpustakaan.
    - c. program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerah perlu didukung agar perpustakaan bisa memperluas layanan tidak hanya sebagai sarana peminjaman buku saja, melainkan juga sebagai pusat untuk melakukan kegiatan budaya, rekreatif, ekonomi, dan sosial.
    - d. dukungan dari Komisi X DPR RI juga sangat dibutuhkan dalam mendorong penganggaran kembali pembangunan perluasan gedung perpustakaan melalui DAK dari Kemendikbudristek yang terhenti. Pembangunan yang belum selesai cukup mengganggu dalam melakukan transformasi perpustakaan.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal dalam kesempatannya menyampaikan informasi dan aspirasi di antaranya, sebagai berikut:
  - a. nilai indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) di Kabupaten Tegal 53,911153, jika pembagiannya adalah jumlah penduduk maka angkanya sangat kecil.
  - b. kebanyakan tenaga perpustakaan di SD dan SMP itu adalah mereka yang masih berstatus guru.
  - c. memohon supaya ada bantuan untuk RKB SD dan SMP karena selama ini banyak SD yang perlu diadakan rehabilitasi. Hal ini karena ketika SD tersebut banyak yang belum direhab membuat perpustakaan dialihfungsikan sebagai ruang belajar mengajar.
  - d. tahun 2022 kemarin, SMP mendapat alokasi dana sekitar Rp14 miliar dan tahun 2023 hanya sekitar Rp1 miliar sekian. Oleh karena itu, memohon pemerintah pusat untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana, baik itu rehabilitasi maupun ruang kelas baru.
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal dalam kesempatannya menyampaikan dengan poin utama sebagai berikut:
  - a. sampai saat ini belum pernah melakukan survei dan kajian menggunakan jasa lembaga survei yang profesional untuk mengukur tingkat kepuasan layanan perpustakaan.
  - b. judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tegal masih kurang, saat ini hanya tersedia tidak sampai 30.0000 buku, yang seharusnya minimal 50.000
  - c. saat ini kekurangan jumlah ruang kelas masih terjadi di Kabupaten Tegal, sehingga tidak sedikit terjadi pengalihan fungsi gedung perpustakaan menjadi ruang kelas belajar.
4. Perwakilan Perpustakaan Komunitas Aisyiah, Nur'aini dalam kesempatannya menyampaikan aspirasi sebagai berikut:
  - a. meminta bantuan agar perpustakaan komunitas ada di kompleks Aisyiyah dan diberikan bantuan lemari dan lain sebagainya.
  - b. perpustakaan komunitas tidak punya tenaga yang ahli di bidang perpustakaan. Memang bisa memanfaatkan anak-anak panti, tetapi mereka butuh pelatihan.

5. Perwakilan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tegal, Syaifuddin, dalam kesempatannya menyampaikan informasi dengan poin utama di antaranya:
  - a. memiliki beberapa program untuk meningkatkan budaya literasi siswa yaitu; kegiatan Gesubak (gerakan suka membaca), kegiatan Gempita (gerakan menulis, presentasi, dan bercerita), kegiatan Siharimi (literasi hari besar nasional dan hari besar Islam) dan kegiatan Absiba (ajang penghargaan berbasis literasi).
  - b. jumlah buku yang relatif kurang dan tidak sebanding dengan jumlah siswa. Solusinya, MIN 2 Tegal mengadakan infaq buku dari wali murid untuk minimal memberikan dua judul buku.
  
6. Perwakilan Budayawan Kabupaten Tegal, Apito Lakre dalam kesempatannya menyampaikan pandangannya sebagai berikut:
  - a. sekolah favorit itu bukan yang nilainya bagus-bagus, tetapi sekarang harus dicamkan bahwa sekolah favorit itu adalah sekolah yang siswa-siswinya mempunyai minat baca yang sangat tinggi.
  - b. perpustakaan adalah ruang untuk memulai ilmu pengetahuan, mendapatkan cahaya kehidupan, dan mendapatkan kebijaksanaan sehingga harus dibuat pemilihan warga terbaik dalam kategori literasi
  - c. mengusulkan adanya kontestasi kepala desa favorit bagi kepala desa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pemajuan literasi di desa.
  
7. Perwakilan perguruan tinggi Kabupaten Tegal dalam kesempatannya menyampaikan informasi sebagai berikut:
  - a. perpustakaan perguruan tinggi sudah terakreditasi B.
  - b. layanan yang diberikan oleh perpustakaan perguruan tinggi adalah layanan referensi, layanan audio visual, dan layanan buku media.
  - c. salah satu keunggulan perguruan tinggi ini adalah adanya Pojok Literasi Tegal.
  - d. meminta agar Pojok Literasi Tegal dioptimalisasikan dan meminta hibah database jurnal internasional.
  
8. Perwakilan dari Badan Bahasa dalam kesempatannya merespon masukan dan aspirasi sebagai berikut:
  - a. tahun 2022, Badan Bahasa mengirimkan dua puluh sembilan SD buku sekitar 1000 judul. Sekolah-sekolah yang dikirim buku adalah sekolah yang nilai ANBK-nya paling rendah. Buku-buku yang dikirim itu adalah buku bacaan yang menyenangkan dan bisa membangkitkan imajinasi anak. Buku yang kita pilih sekarang ada lebih dari 3000 judul dan hari ini Badan Bahasa membawa *flashdisk/hardisk* berisikan 500 judul buku digital yang siap dicetak mulai dari buku untuk PAUD hingga SMA yang siap diserahkan ke Bupati.
  - b. tujuh variabel atau unsur yang diukur di dalam IPLM, namun semuanya hanya tentang sarana dan prasarana. Padahal kalau dilihat judulnya, indeks ini tentang peningkatan literasi masyarakat. Nanti bisa disampaikan ke Perpustakaan agar pengukuran yang dilakukan bisa sejalan dengan pengukuran yang dilakukan di ANBK sehingga nantinya Badan Bahasa bisa membantu dan turut serta mengukur tingkat literasi manusia.

- c. buku-buku yang dibagikan oleh Badan Bahasa pada tahun 2022 itu akan ditambahkan alokasinya pada tahun 2024. Ketika buku-buku itu telah sampai di sekolah, nanti akan ada tim pendamping yang akan membantu sekolah dalam mengelola dan memanfaatkan buku dengan baik.
  - d. ada beberapa sekolah yang dikunjungi oleh Badan Bahasa yang setelah mereka dikirim buku, kemudian mereka bekerjasama dengan taman bacaan masyarakat (TBM). Jadi, kalo pagi hari buku ada di sekolah, sedangkan pada sore hari bukunya dipinjamkan ke TBM.
9. Perwakilan Perpustakaan dalam kesempatannya merespon aspirasi dengan poin utama sebagai berikut:
- a. menyampaikan bantuan yang telah diberikan ke Kabupaten Tegal, di antaranya, (1) memberikan 2 mobil di tahun 2016 dan 2017, (2) DAK perpustakaan, kalau dana pembangunan untuk perpustakaan kabupaten itu senilai 10 miliar dan untuk perpustakaan provinsi senilai 15 miliar, (3) bantuan untuk pondok pesantren di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 ada 4 paket, (4) bantuan perpustakaan Lapas pada tahun 2013 ada sembilan paket, (5) bantuan untuk perpustakaan komunitas dari tahun 2012 sampai tahun 2017 ada 4 paket total 11 ribu eksemplar buku yang diberikan ke Kabupaten Tegal dan itu masih di luar buku PPK dan Pojok Baca Digital.
  - b. mendorong agar Perpustakaan Umum Kabupaten Tegal untuk mulai menggunakan Kartu Sakti untuk anggotanya agar terintegrasi dengan layanan Perpustakaan RI.
  - c. mengusulkan seluruh kepala perpustakaan sekolah dari jalur guru wajib mengikuti Diklat calon kepala perpustakaan sekolah.
  - d. keberadaan pustakawan dari guru ini juga menjadi masalah nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, kepala perpustakaan itu dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan
  - e. perpustakaan memiliki NPP adalah wajib sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 15 yang mengamanatkan bahwa pembentukan perpustakaan memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional dan akan mendapat NPP. Diharapkan seluruh perpustakaan di Kabupaten Tegal bisa memiliki NPP. Bahkan Perpustakaan RI telah memberikan dana dekonsentrasi untuk percepatan NPP.
  - f. Perpustakaan RI dari sisi pembinaan pustakawan dan perpustakaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku menyampaikan bahwa pustakawan berhak mendapatkan penghasilan di atas upah minimum setempat. Namun, memang pada realitanya banyak pustakawan yang tidak memperoleh penghasilan sebesar itu. Kepala dinas pendidikan sebaiknya merumuskan regulasi agar pustakawan memperoleh penghasilan yang semestinya.
  - g. Untuk universitas, kalau ada dari BPK melakukan evaluasi tolong dibantu terkait bantuan yang sudah diberikan oleh Perpustakaan RI.
10. Komisi X DPR RI melalui Dr. H. A. Mujib Rohmat, M.H. dalam kesempatannya menyampaikan respon sebagai berikut:

- a. Kementerian Desa punya dana untuk pengembangan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah pengembangan literasi. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Kementerian Desa, jumlah perpustakaan desa ada sekitar lebih dari 40-an ribu dari 73 ribu desa sekian.
- b. alokasi dana desa (ADD) dapat digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia. Masalahnya adalah bagaimana keberanian dari Bupati atas dasar regulasi untuk membuat afirmasi anggaran pengembangan sumber daya manusia di desa.
- c. tenaga perpustakaan sebaiknya diusulkan secara menyeluruh sesuai kebutuhan nasional agar ada pengangkatan karena lulusan perpustakaan itu cukup banyak

### **C. Temuan Permasalahan Penyelenggaraan Literasi di Kabupaten Tegal**

1. Sekolah di Tegal belum tersedia tenaga khusus pengelola perpustakaan di sekolah yang sesuai dengan kompetensinya.
2. Dinas Pendidikan Kebudayaan belum memiliki komunitas literasi binaan.
3. Kurangnya fasilitas ruang kelas belajar, tidak sedikit gedung perpustakaan SD dialihkan menjadi ruang kelas, dan
4. Pembangunan Gedung Perpustakaan Soekarno-Hatta Kabupaten Tegal mangkrak akibat tidak selesainya pembangunan.

## **III. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan Rapor Pendidikan Kabupaten Tegal tahun 2023 capaian literasi Kabupaten Tegal pada jenjang SMA skor 78,08 (baik), jenjang SMP skor 71,01 (baik), dan jenjang SD skor 66,05 (sedang). Per tahun 2023 telah dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal melakukan permbinaan perpustakaan tingkat satuan pendidikan dasar sebanyak 108 perpustakaan. Capaian persentasi perpustakaan yang telah memiliki gedung perpustakaan sebesar 27,3 %. Namun yang memiliki tenaga perpustakaan sebanyak 40 perpustakaan, sehingga capaian hanya sebesar 10 %.
2. Namun dalam penyelenggaraan layanan literasi di Kabupaten Tegal masih memiliki kendala, di antaranya, (1) sekolah di Tegal belum tersedia tenaga khusus pengelola perpustakaan di sekolah yang sesuai dengan kompetensinya, (2) Dinas Pendidikan Kebudayaan belum memiliki komunitas literasi binaan, (3) kurangnya fasilitas ruang kelas belajar, tidak sedikit gedung perpustakaan SD dialihkan menjadi ruang kelas dan (4) pembangunan Gedung Perpustakaan Soekarno-Hatta Kabupaten Tegal mangkrak akibat tidak selesainya pembangunan.
3. Terdapat beberapa usulan dari pemangku literasi Kabupaten Tegal guna pemajuan layanan literasi di Kabupaten Tegal, di antaranya; (1) meminta dukungan anggaran penyediaan dan perawatan hosting dan domain yang berkapasitas besar guna menghadirkan perpustakaan digital serta termasuk layanan akses publik dalam pemanfaatan perpustakaan digital; (2) pengadaan tenaga teknis sebagai pengelola/admin, serta pelatihan tenaga teknis untuk pengelolaan perpustakaan digital; (3) pendampingan dalam upaya penerbitan peraturan bupati terkait budaya literasi digital; (4) pengadaan/rehabilitasi gedung perpustakaan; (5) adanya penambahan bantuan hibah buku kepada

perpustakaan di sekolah-sekolah dan taman baca di lingkungan Kabupaten Tegal; dan (6) adanya penambahan pagu anggaran kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal lewat dana APBN/APBD.

#### **IV. REKOMENDASI**

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI dan Perpustakaan RI mendukung upaya pemerintah daerah guna meningkatkan dukungan layanan perpustakaan digital, peningkatan sarana prasarana perpustakaan dan pengadaan tenaga perpustakaan yang kompeten sesuai dengan rasio kebutuhan.
2. Komisi X DPR RI mendesak Perpustakaan RI agar meningkatkan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pembangunan perpustakaan daerah yang terindikasi mangkrak.
3. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait peningkatan SDM pengelola perpustakaan, penambahan bantuan hibah buku kepada perpustakaan di sekolah-sekolah dan taman baca, serta penambahan pagu anggaran kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan lewat dana APBN/APBD.

#### **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Literasi Komisi X DPR RI ke Kabupaten Tegal Jawa Tengah pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 25 September 2023

**Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X  
DPR RI,**

**Ttd.**

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.  
A 444**